

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2018**

(Studi Kasus Ketahanan Pangan di Kecamatan Mlati)

Oleh:

Ulinnuha Adha

20150520085

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2019

Tempat : Ruang Ujian IP 1

Pukul : 14.00-15.00 WIB

SUSUNAN TIM PENGUJI

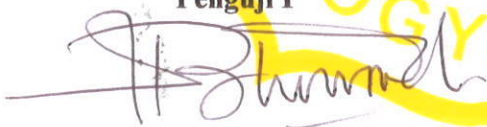
Ketua



Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.

NIK: 19650827199709 163 055

Penguji I



Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

NIK: 19741227200004 163 067

Penguji II



Dewi Sekar Kencono, S.IP., M.Si

NIK: 19890729201507 163 153

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

**EVALUASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2018
(Studi Kasus Ketahanan Pangan di Kecamatan Mlati)**

Ulinnuha Adha

FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: ulinnuha.adha.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Akibatnya alih fungsi penggunaan tanah tidak dapat dicegah, lahan pertanian subur dan sawah beririgasi teknis di sekitarnya semakin lama semakin luas dialihgunakan menjadi tempat-tempat kegiatan ekonomi dan pemukiman. Akibatnya, semakin tumbuh pemukiman-pemukiman baru yang dikembangkan sebagai respon tingginya minat pendatang untuk tinggal di wilayah Kecamatan Mlati ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kecamatan Mlati dalam permasalahan ketahanan pangan dengan berlandaskan hukum pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2015 – 2019, yang ditinjau dari aspek kebijakan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan pembangunan kelembagaan ketahanan pangan di Kecamatan Mlati.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengambil data menggunakan tiga cara yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Pemerintah Kecamatan Mlati, dan Masyarakat sekitar.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tetap mempertahankan Progam Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dalam jangka panjang. 2) Kecamatan Mlati yang terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Sumberadi, Desa Sendangadi, Desa Tirtoadi, Desa Tlogoadi, Desa Sinduadi 3) Evaluasi Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan.

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa saran bagi semua pihak yang membutuhkan, antara lain: 1) Kepada Pemerintah daerah perlu untuk segera membuat peraturan daerah mengenai lahan sawah abadi, guna menindaklanjuti Perda DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2) Memberikan apresiasi kepada masyarakat 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Ketahanan Pangan

ABSTRACT

This research on the background of uncontrolled urbanization has resulted in widespread urban activities that are increasingly pressing for agricultural activities in rural areas that are directly adjacent to urban areas. As a result, land use functions cannot be prevented, fertile agricultural land and surrounding irrigated rice fields are increasingly being used as places of economic activity and settlements. As a result, growing new settlements were developed in response to the high interest of migrants to live in the Mlati Sub-district area. This study aims to find out how the Mlati District Government policy evaluates the issue of food security with a legal basis in the Regulation of the Governor of Special Region of Yogyakarta Number 80 of 2016 concerning Regional Food and Nutrition Action Plans for 2015-2019, which is viewed from the aspect of food availability, distribution food, food consumption, and development of food security institutions in Mlati District.

The research method used is descriptive qualitative by taking data using three methods, namely observation, documentation, and interviews with speakers from the Agriculture, Food and Fisheries Service of Sleman Regency, Mlati District Government, and surrounding communities.

The results of this study are: 1) The Agriculture, Food and Fisheries Service of Sleman Regency continues to maintain a Program for Improving Agricultural / Plantation Food Security in the long term. 2) Mlati sub-district consisting of 5 villages, namely Sumberadi Village, Sendangadi Village, Tirtoadi Village, Tlogoadi Village, Sinduadi Village received counseling / socialization on monthly food security from the District Parties and BP4. 3) Policy Evaluation taken by the District.

Based on the research, there are a number of suggestions for all parties in need, including: 1) To the regional government, it is necessary to immediately make a regional regulation on eternal rice fields, in order to follow the DIY Local Regulation Number 10 of 2011 concerning the Protection of Sustainable Food Agriculture. 2) Giving appreciation to the community 3) For future researchers it is expected to develop this research.

Keywords: Policy Evaluation, Food Security

PENDAHULUAN

Penelitian ini melihat dari proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Persoalan ini harus dicarikan solusi pemecahannya karena melihat juga dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan ini dapat merugikan petani di Kabupaten Sleman dan terancamnya produksi tanaman pangan. Adanya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah akan mempengaruhi produksi beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Akibatnya alih fungsi penggunaan tanah tidak dapat dicegah, lahan pertanian subur dan sawah beririgasi teknis di sekitarnya semakin lama semakin luas dialihgunakan menjadi tempat-tempat kegiatan ekonomi dan pemukiman.

Menurut Maleha dan Susanto (2010), ketahanan pangan bukan hanya akan memberikan bagi peningkatan produktivitas, namun juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan. Pada pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena:

1. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling azasi bagi manusia
2. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi
3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan

Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta, seperti Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping, hanya memiliki ruas-ruas jalan usaha tani yang pendek karena memang luas lahan pertanian yang sudah terbatas sehingga perubahan guna lahan pertanian menjadi permukiman disekitar jalan usaha tani juga sedikit. Yang menarik dari dipilihnya Kecamatan Mlati ini karena di daerah ini terdapat lima desa yang berbeda lahan pertanian karena disebabkan oleh perubahan jalan usaha tani menjadi bangunan pemukiman padat. Kebijakan publik yang pertama dilakukan oleh Pemerintah bisa melalui mekanisme perizinan. Tegaknya mekanisme perizinan dapat menjadi kontrol bagi Pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan buruk dari pesatnya pembangunan di Kecamatan Mlati.

Kebijakan untuk meloloskan izin atau menggagalkan izin yang diajukan oleh pemohon bisa berdampak luas bagi masyarakat kedepan. Dampak sosial ini yang kemudian berkembang dan bisa merubah keadaan kehidupan sosial dan keadaan pangan di masyarakat.

Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa sehingga kerap terjadi peluberan warga yang ada kearah Sleman. Pemfokusan pemanfaatan wilayah telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dari pemamparan tersebut terlihat Pemerintah telah melakukan perencanaan wilayah melalui produk kebijakan berupa aturan seperti Perda No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman tahun 2006-2025 agar wilayah Kabupaten Sleman lebih tertata dengan baik. Kecamatan Mlati sebagai wilayah yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan Kota Magelang dan Semarang, menjadikan wilayah ini memiliki jalan nasional sebagai jalan utama penghubung Kota Yogyakarta dengan Kota besar di wilayah utara DIY.

Strategisnya wilayah Kecamatan Mlati ini direspon masyarakat dengan memanfaatkan lokasi ini untuk meningkatkan kondisi perekonomian seperti berdagang. Sebagai wilayah yang memiliki

lokasi strategis dan jarak yang ideal untuk ke pusat Kota dan keramaian ditambah memiliki tingkat perputaran ekonomi yang tinggi menarik minat masyarakat dari wilayah lain untuk bermigrasi ke wilayah Kecamatan Mlati. Pendetang baru bermunculan dan menjadi penduduk di Kecamatan ini. Akibatnya, semakin tumbuh pemukiman-pemukiman baru yang dikembangkan sebagai respon tingginya minat pendatang untuk tinggal di wilayah Kecamatan mlati ini.

Peneliti dapat menekankan pada penelitian ini akan lebih baru topiknya, lokasi penelitian, dan teori yang diambil berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan di Kecamatan Mlati terhadap ketahanan pangan. Kecamatan Mlati dipilih untuk dijadikan fokus penelitian berdasarkan kebijakan ketahanan pangan yang dijalankan di daerah tersebut, sehingga menarik untuk segera dikaji. Sehingga saya disini menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Mlati)”**

KERANGKAT TEORITIK

A. Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak para ahli yang memberikan definisi tentang kebijakan publik. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Para ahli yang memberikan definisi mengenai kebijakan publik antara lain (Budi, 2002).

Robert Eyestone, mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R. Dye, mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah merupakan pilihan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam konsep demokrasi modern, kebijakan Negara (publik) tidaklah berisi beberapa pikiran/pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini public mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan-kebijakan Negara. Setiap kebijakan Negara harus berorientasi pada kepentingan publik.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Sedangkan kriteria/indikator evaluasi menurut (Dunn, 2013) sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah Penilaian terhadap *efektivitas* ditunjukkan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.
2. Efisiensi adalah Penilaian terhadap *efisiensi* ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, keuntungan dan manfaat.
3. Kecukupan adalah Penilaian terhadap *adequacy* ditunjukkan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.
4. Pemerataan adalah Penilaian terhadap *equity* ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional dan merata untuk aktor-aktor yang terlibat.
5. Responsivitas adalah Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/ kegiatan/ kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/ keinginan dari target grup.
6. Ketepatan adalah Penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui hasil yang diinginkan benar-benar berguna, bernilai, dan efisien kepada target grup. (William Dunn,2013)

C. Ketahanan Pangan

Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara sedang berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu, sesuai dengan definisi PBB adalah menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada *International Conference of Nutrition* pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif (Hakim 2014).

Konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

- 1) Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani

- 2) Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan), yaitu bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral
- 3) Aman (aspek kesehatan), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia
- 4) Merata (aspek distribusi), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat
- 5) Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar

PEMBAHASAN

1. Efektivitas

a. Target capaian Progam

Kejelasan tujuan merupakan pencapaian tujuan yang menggunakan proses, agar pencapaian tujuan akhir dapat tercapai melalui suatu tahapan. Kejelasan tujuan juga merupakan cara yang ditentukan

oleh sebuah instansi atau organisasi yang menetapkan tujuan dalam kurun waktu yang singkat, dengan harapan memperoleh hasil yang maksimal dari kebijakan yang telah ditetapkan. Adanya kejelasan tujuan sebagai alasan yang jelas kenapa kebijakan tersebut dibentuk. Rudi Suryanto, selaku Kepala Bidang Pangan Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa:

“dengan adanya progam ini yang jelas masyarakat sangat terbantu sekali, karena secara langsung masyarakat dapat imbasnya. Progam ini adalah salah satu untuk menangani lahan pertanian yang semakin menyempit, dari tahun ke tahun dengan adanya progam ini si alhamdulillah ketahanan pangan di kecamatan mlati dapat diatasi dengan 12 kegiatan yang diprogramkan dari dinas. Setidaknya progam ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat daerah.” (29 April 2019, pukul 10.00 WIB).

b. Waktu untuk menjalankan Progam

Berdasarkan ketetapan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyusun rencana progam, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2017-2021. Selain itu pada Renja Kecamatan Mlati telah menetapkan bahwa untuk tiap tahunnya anggaran itu digunakan sehingga bisa diambil kesimpulan untuk

seluruh program yang dibuat hanya berlaku 1 tahun lalu dievaluasi untuk tahun berikutnya. Jadi, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan setiap tahunnya berjalan dengan jangka waktu 1 tahun lalu dievaluasi apa saja yang perlu ditambah maupun apa saja yang kurang dan untuk 12 kegiatan itu berjalan setiap bulannya.

Rudi Suryanto, selaku Kepala Bidang Pangan Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa:

“untuk waktu program ini hampir 1 tahun sesuai tahun anggaran dan hasilnya pun 100% dengan bentuk outputnya seperti pada kegiatan distribusi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi dan keamanan pangan.” (29 April 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan tabel di atas, waktu untuk pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Desa Sumberadi, Desa Tlogoadi, Desa Tirtoadi, Desa Sendangadi, Desa Sinduadi ada beberapa waktu untuk kegiatan tertentu. Untuk waktu 1-3 bulan kegiatan seperti distribusi harus terlaksana secara tepat dan sesuai karena untuk menunjang kegiatan yang lainnya. Lalu, waktu 1-6 bulan untuk peningkatan kelembagaan agar terciptanya koordinasi yang terstruktur saat kegiatan terlaksana dan penanganan daerah rawan harus sesuai waktu 6 bulan karena untuk selebihnya jika sudah ditangani secara tepat dan sesuai waktunya,

daerah rawan pangan ini tinggal mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam jangka 1-12 bulan.

2. Efisiensi

a. Manfaat Program

Pelaksanaan program ini Kecamatan Mlati selalu melibatkan masyarakat dalam hal teknis maupun non-teknis sehingga ini menjadi tolak ukur penilaian dari pihak kecamatan, apakah masyarakat merasakan manfaat program ini. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Mlati berupa:

- a) masyarakat dapat meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri
- b) masyarakat dapat menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat
- c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d) mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi
- e) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat

- f) meningkatkan kesejahteraan bagi petani, dan pelaku usaha pangan

Hal tentang manfaat ini disampaikan oleh Ibu Yuni Suryani yang mengatakan:

“kami selalu berperan aktif dalam beragam pelatihan maupun sosialisasi ke masyarakat sehingga semua elemen masyarakat di 5 desa ini dapat merata kemampuan individu dan kelompok taninya agar dapat mendapat modal ilmu maupun modal agar dapat menciptakan pangan sendiri.” (30 April 2019, 09.00 WIB).

b. Biaya yang digunakan

Dana dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kecamatan Mlati, sudah memiliki dana khusus untuk melaksanakan program Ketahanan Pangan. Dalam menjalankan program dan kegiatan ini menggunakan anggaran yang didapat dari APBD Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Anggaran merupakan komponen yang sangat penting, sehingga komponen ini diharapkan mampu untuk menunjang kegiatan dalam program ketahanan pangan juga digunakan untuk memenuhi keperluan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Berikut kutipan wawancara dengan Rudi Suryanto, selaku Kepala Bidang Pangan Dinas Kabupaten Sleman bahwa:

“untuk tahun ini kecamatan mlati mendapat anggaran Rp 120.444.000,00 untuk 12 kegiatan dalam 1 program tadi dan untuk masing-masing seksi. ini saya juga masih

menghitung-hitung ulang sehingga dana APBD tersebut sewaktu-waktu masih bisa berubah tetapi kisaran dana untuk program tersebut hanya segitu lalu pengeluaran terbesar di seksi konsumsi karena itu mencakup seluruh kegiatan.” (29 April 2019, pukul 10.00 WIB).

3. Kecukupan

a. Strategi yang digunakan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang cukup dan untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan program ketahanan pangan melalui upaya mencapai ketahanan pangan adalah melibatkan masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan menempatkan masyarakat sebagai objek mulai dari identifikasi lokasi dan kebutuhan, perencanaan pelaksanaan sehingga masyarakat betul-betul berperan aktif dalam setiap kegiatan. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yang dilakukan oleh Kecamatan Mlati memberikan fasilitas teknis berupa bantuan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang dikerjakan secara berkala dengan setiap bulannya diadakan di 5 Desa yaitu Desa Sumberadi, Desa Tlogoadi, Desa Sendangadi, Desa Sinduadi, Desa Tirtoadi.

Dalam melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan supaya berjalan lancar dan sesuai dengan target yang ditentukan tentu saja ada strategi khusus yang dilakukan

Pemerintah Kecamatan Mlati dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan . Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Suryanto, selaku Kepala Bidang Pangan Kabupaten Sleman, beliau mengatakan bahwa ada beberapa Strategi yang dijalankan yaitu:

- a. Melakukan pendampingan intensif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian, pangan dan perikanan
- b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pertanian
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan pertanian, pangan dan perikanan

b. Ketersediaan fasilitas

Adapun fasilitas yang disediakan oleh Kecamatan Mlati untuk masyarakat yaitu:

- a. Pembentukan GAPOKTAN dilima desa yang minimal 1 bulan sekali ada rapat dan mendapat subsidi dari kepala desa setempat untuk mendukung setiap ada pertemuan tersebut
- b. Pelatihan secara gratis yang berkala setiap minggu dari Pihak BP4 Wilayah III Kabupaten Sleman

- c. Alat-alat pertanian yang bisa dipinjam sewaktu-waktu yang dititipkan di GAPOKTAN tiap desa

Dengan adanya bantuan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat maupun kelompok tani dapat menciptakan pangan secara mandiri dan pertanian bisa menjadi saran potensial untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, meningkatkan ketahanan pangan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

3. Pemerataan

a. Distribusi Progam

Untuk melihat apakah hasil kegiatan dari progam sudah didistribusikan dengan merata pada setiap kelompoknya. Dana Progam Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yang disalurkan kepada Kecamatan Mlati lalu dialokasikan untuk 5 Desa yaitu Desa Sumberadi, Desa Tlogoadi, Desa Sendangadi, Desa Sinduadi, Desa Tirtoadi untuk menunjang kegiatan-kegiatan.

Dana untuk setiap kegiatan sudah ditransparan sehingga pada kegiatan distribusi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi dan keamanan pangan telah terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat. Harapannya setelah dana dialokasikan untuk 5 Desa tersebut adalah sesuai dengan manfaat dan tujuan yang

diperlukan dalam pelaksanaan program. Selain itu manfaat dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan juga sudah dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan nyata oleh masyarakat yang menerima dampak dari program tersebut.

Untuk masyarakat rentan pangan di Kecamatan Mlati pada 3 tahun terakhir tidak ada karena pemantauan berkala dari pihak Kecamatan maupun dari Penanggungjawab BP4 Wilayah III untuk mengecek ketahanan pangan di lima desa tersebut. Sehingga, bantuan tersalurkan semua untuk seluruh kegiatan di lima desa ini.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Yuni Suniarti yang mengatakan:

“setiap minggu ada petugas dari sini yang turun ke desa untuk mengecek apakah ada kekurangan di masyarakat lalu setelah itu dilaporkan ke kami agar cepat ditindaklanjuti, namun beberapa waktu yang lalu sudah jarang ada masyarakat yang mengeluh terhadap program ini” (30 April 2019, pukul 09.00 WIB).

4. Responsivitas

a. Tanggapan masyarakat terhadap Program

Untuk menilai apakah hasil kebijakan tersebut memuat preferensi atau nilai yang dapat memuaskan sasaran kebijakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya jika belum menanggapi kebutuhan actual dari

kelompok yang seharusnya diuntungkan dari suatu adanya kebijakan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dinyatakan berhasil karena dari wawancara penulis dengan masyarakat yang menerima program ini dapat memuaskan penerima program, karena dengan adanya program ketahanan pangan maka masyarakat rentan pangan dapat menciptakan pangan sendiri dan mempertahankan lahan pertanian disekitarnya dari pada sebelum program ini dijalankan.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Yanto selaku masyarakat di Desa Sendangadi:

“ya saya sangat berterimakasih banget kepada pemerintah dengan adanya program ini, ini sangat membantu sekali buat warga disini. Ya paling nggak kami warga sudah bisa menciptakan pangan sendiri di lahan pertanian di perkarangan rumah setelah ada pelatihan maupun sosialisasi.” (02 Mei 2019, pukul 09.00 WIB).

b. Prioritas Rentan Pangan

Pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan ini di Kecamatan Mlati tidak ada prioritas tertentu pada kegiatan-kegiatannya dalam pelaksanaannya di lima desa (Desa Sumberadi, Desa Tlogoadi, Desa Tirtoadi, Desa Sendangadi, Desa Sinduadi) sehingga harapannya Program ini bisa merata dan seimbang pada pelaksanaannya. Hal ini telah

disampaikan juga oleh Bapak Rudi Suryanto, selaku Kepala Bidang Pangan Dinas Kabupaten Sleman bahwa:

“progam ini buat untuk masyarakat dalam rangka memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman mas, sehingga kami membuat progam yang tidak ada prioritas tertentu di masyarakat yang rentan pangan maupun daerah yang rentan pangan, jikapun ada yang perlu diprioritaskan maka kami akan mengejar dengan bantuan pihak PPLH daerah tersebut agar diawasi terus.”(29 April 2019, pukul 10.00 WIB).

Menurut Winarno (2002: 189):

“Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.”

Respon dari kelompok sasaran dalam menjalankan Progam Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik berdasarkan pengamatan saat penelitian ke lapangan. Dilihat dari kegiatan distribusi pangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak ada keluhan dan antusias yang tinggi. Lalu, pada kegiatan ketersediaan pangan selanjutnya masyarakat di Desa Sumberadi, Desa Tlogoadi, Desa Tirtoadi, Desa

Sendangadi, Desa Sinduadi tersebut juga menyambut baik dan antusiasnya tinggi.

Terakhir, pada kegiatan konsumsi dan keamanan pangan ini juga disambut baik oleh masyarakat dan antusiasnya tinggi saat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Pihak Kecamatan Mlati maupun Penanggungjawab BP4 Wilayah III Sleman menyampaikan dalam menjalankan progam ini sudah cukup baik. Lalu, untuk respon dari Kasi Perekonomian dan Pembangunan terhadap keluhan, tersedia banyak akes baik secara *online* dan *offline* yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan serta informasi yang didapatkan dari pengaduan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan progam. Serta mengkaji secara mendalam terkait permasalahan yang ada dimasyarakat terhadap ketahanan pangan.

5. Ketepatan

a. Hasil Progam

Indikator ini merujuk pada hasil yang dicapai dari progam tersebut bermanfaat atau tepat kepada kelompok sasaran. Ketepatan merujuk pada tujuan progam dan ketepatan sasaran, tujuan dari progam ini adalah untuk mencapai Permasalahan pangan masih menjadi perhatian utama dalam upaya pembangunan secara nasional maupun regional. Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi kebijakan Kecamatan Mlati dalam mengukur tingkat ketahanan pangan, dan menggambarkan strategi pemenuhan pangan rumah tangga pertanian di Kecamatan Mlati.

b. Progam sudah sesuai

Kesimpulan secara umum, terkait evaluasi kebijakan dalam ketahanan pangan di Kecamatan Mlati tahun 2018 diukur menggunakan enam indikator. Setelah dilakukannya analisis dan data yang didapatkan dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Kecamatan Mlati berhasil di enam indikator. Hal ini disimpulkan berdasarkan, hasil keseluruhan yang telah diukur dengan indikator serta parameter yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi. Dalam indikator ketepatan progam ketahanan pangan bahwa progam ini sangat berguna bagi masyarakat dan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan progam dan progam ini sudah tepat sasaran untuk masyarakat rentan pangan maupun masyarakat dalam mempertahankan lahan pertanian.

Adapun ketepatan pencapaian kinerja ketahanan pangan yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman selama 2 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.11
Ketepatan Capaian Kecamatan Mlati
pada Tahun 2017-2018

Indikator	Tahun	
	2017	2018
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		
Sertifikat PD/Produk Domestik	5	8
Sertifikat Prima 3 Produk Segar	12	14
Sertifikat Organik	9	9
Kelembagaan Distribusi Pangan		
LDPM/Lembaga Desa Mandiri Pangan	10	12
LAPM/Lembaga Akses Pangan Masyarakat	5	7
PUPM/Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	3	9
Ketersediaan Pangan		
Desa Mandiri Pangan		5
Jumlah Lumbung	24	27

Sumber: Wawancara dengan Kasi Perekonomian dan Pembangunan

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan data yang sudah diperoleh serta diolah pada bab sebelumnya Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sleman Tahun 2018 (Studi Kasus Ketahanan Pangan Di Kecamatan Mlati) dapat disimpulkan bahwa, dari hasil penelitian dan pembahasan tentang ketahanan pangan di Kecamatan Mlati telah diambil kesimpulan berupa:

1. Nilai efektifitas yang diukur dari target capaian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kecamatan Mlati dalam mencapai tujuan program sudah efektif terbukti dengan sesuainya waktu pelaksanaan program untuk merealisasikan semua kegiatan yang ada dalam jangka waktu 1 tahun dimana terbagi ada 3 seksi distribusi pangan, seksi ketersediaan pangan, seksi konsumsi dan keamanan pangan.
2. Efisiensi pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kecamatan Mlati dalam mewujudkan ketahanan pangan sudah efisien hal ini didukung dengan adanya manfaat untuk masyarakat, salah satunya adalah masyarakat dapat menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Untuk dana yang digunakan untuk pelaksanaan program sumbernya ada dan jelas berasal dari APBD, dana tersebut sudah sesuai kebutuhan program karena setiap tahunnya dianggarkan didokumen pelaksanaan anggaran.
3. Kecukupan dalam menerapkan strategi untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di

Kecamatan Mlati ini menjadi parameter pada pelaksanaannya. Akan tetapi parameter tersebut masih banyak perlu untuk ditingkatkan maupun ditambah karena hal ini menyangkut ketahanan pangan seluruh Kecamatan. Ketersediaan fasilitas yang diberikan merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pihak Kecamatan agar masyarakat antusias dalam mengimplementasikan program ini.

4. Pemerataan dalam keadilan distribusi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kecamatan Mlati ini sudah merata. Untuk Desa Sumberadi, Desa Tlogoadi, Desa Tirtoadi, Desa Sendangadi, Desa Sinduadi dapat dibilang sudah merata karena adanya representasi dari masyarakat dan untuk pihak Kecamatan Mlati maupun Penanggungjawab PPLH wilayah III selalu mengikuti perkembangan dari 12 kegiatan tersebut sehingga pelaksanaan program ini berjalan maksimal.
5. Respon pada kegiatan konsumsi dan keamanan pangan ini juga disambut baik oleh masyarakat dan antusiasnya tinggi saat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Pihak Kecamatan Mlati maupun Penanggungjawab BP4 Wilayah III Sleman menyampaikan dalam

menjalankan program ini sudah cukup baik. Lalu, untuk respon dari Kasi Perekonomian dan Pembangunan terhadap keluhan, tersedia banyak akses baik secara *online* dan *offline* yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan serta informasi yang didapatkan dari pengaduan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program. Serta mengkaji secara mendalam terkait permasalahan yang ada dimasyarakat terhadap ketahanan pangan.

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Sleman ini berhasil di Kecamatan Mlati karena hasil yang dicapai hampir maksimal diraih dilima desa yaitu Desa Sumberadi, Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Tirtoadi sesuai dengan target capaian yang dibuat oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. kegiatan dari seksi distribusi, seksi ketersediaan pangan dan seksi konsumsi dan keamanan pangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kabupaten Sleman dan Kecamatan Mlati dalam mengevaluasi kebijakan program ketahanan pangan. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Peneliti menyarankan untuk membuat kebijakan aturan untuk lahan-lahan pertanian agar tetap ada sehingga jual-beli dengan pihak luar tidak terus menerus terjadi khususnya untuk Desa Sinduadi dan Sendangadi. Perlu ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sleman di skala Kecamatan atau Desa untuk tetap memperhatikan perubahan lahan pertanian tiap tahunnya. Pemerintah daerah perlu untuk segera membuat peraturan daerah mengenai lahan sawah abadi, guna menindaklanjuti Perda DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ketahanan pangan ini. Serta dapat menekan tingginya konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan cara memberikan sanksi berat bagi pihak-pihak swasta nakal yang sering melanggar peraturan mengenai alih lahan persawahan.

3. Memberikan apresiasi kepada masyarakat dengan cara membeli produk pangan mandiri maupun mengadakan bazar/stand makanan daerah disetiap acara di Kecamatan Mlati.
4. Sosialisasi tentang Pengadaan Bank Tanah agar masyarakat paham akan pentingnya lahan pertanian.
5. Tambahan kegiatan untuk tahun depan yaitu pelatihan kepada para petani maupun masyarakat biasa untuk memanfaatkan teknologi pertanian modern, dengan mereka mengerti akan pemanfaatan teknologi pertanian modern mereka bisa mendapatkan peningkatan pada produktivitas tanaman yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002, hal. 14 - 15.
- Dunn, William . 2013. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012,
- Rahmawati, Dian Eka. (2010). *Diktat Metode Penelitian Sosial. Ilmu Pemerintahan*. FISIPOL UMY.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2008.

Suryana, Achmad. *Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya*.

Susanto, Ari. (2015). *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pertanian Kabupaten Sleman*.

Windiani, Reni. *Penelitian : "bali ndeso mbangun deso" dan ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Tengah*. *Politika*, vol. 3, no. 1, April 2012

Web

Website (www.slemankab.co.id) diakses pada tanggal 30 Desember 2018 jam 21.00

Website (www.slemankab.bps.go.id) diakses pada tanggal 30 Desember 2018 jam 21.30

Perundang-undangan

- Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Perda No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman tahun 2006-2025
- Perda No 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2015 – 2019